

Satir dan Subversi Politik: Analisis Wacana Kritis Etika Kekuasaan Jawa Serat

Wicara Keras

Satire and Political Subversion: Critical Discourse Analysis of Javanese Power Ethics in Serat

Wicara Keras

Dewa Alfaquin Faturangga¹ Diefa Octavia Poetra²

M. Syirojul Huda³

¹²³UIN Raden Mas Said Surakarta

dewa-254091001@mhs.uinsaid.ac.id¹ diefaputra.01@gmail.com²

hudasrjl3@gmail.com³

Article history:

Submitted: 10 Januari 2026

Accepted: 15 April 2026

Published: 25 Mei 2026

Abstract: *This study aims to analyze satire and political subversion in Serat Wicara Keras by R. Ng. Yasadipura II as a critique of Javanese power ethics. The research employs a qualitative method using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach to examine the relationship between language, ideology, and power within the text. Data were collected through library research and textual analysis of verses containing socio-political criticism. The findings reveal that Yasadipura II utilizes satire, irony, pejorative metaphors, and moral symbolism as discursive strategies to criticize the moral decadence of the priyayi elite and the crisis of political legitimacy within the royal court. The criticism is conveyed indirectly through a hidden transcript mechanism, enabling symbolic resistance against feudal political culture without direct confrontation. This study also finds that the critical values contained in Serat Wicara Keras remain relevant to contemporary Indonesian politics, particularly regarding oligarchy, dynastic politics, corruption, and the crisis of leadership ethics. Therefore, Serat Wicara Keras is not only a literary and historical text but also a medium of socio-political criticism that reflects the relationship between language, culture, and power in the Javanese tradition.*

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Javanese power ethics, political satire, priyayi hegemony, Serat Wicara Keras.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis satire dan subversi politik dalam Serat Wicara Keras karya R. Ng. Yasadipura II sebagai kritik terhadap etika kekuasaan Jawa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengungkap relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam teks. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan analisis tekstual terhadap bait-bait yang mengandung kritik sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yasadipura II menggunakan satire, ironi, metafora peyoratif, dan simbolisme moral sebagai strategi diskursif untuk mengkritik dekadensi moral elite priyayi dan krisis legitimasi kekuasaan keraton. Kritik tersebut disampaikan secara terselubung melalui mekanisme hidden transcript sehingga memungkinkan resistensi simbolik terhadap budaya politik feodal tanpa konfrontasi langsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai kritik dalam Serat Wicara Keras masih relevan dengan kondisi politik Indonesia kontemporer, terutama terkait oligarki, politik dinasti, korupsi, dan krisis etika kepemimpinan. Dengan demikian, Serat Wicara Keras tidak hanya memiliki nilai sastra dan historis, tetapi juga menjadi medium kritik sosial-politik yang memperlihatkan relasi antara bahasa, budaya, dan kekuasaan dalam tradisi Jawa.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, etika kekuasaan Jawa,, hegemoni priyayi, satire politik, Serat Wicara Keras.

PENDAHULUAN

Kesusastraan Jawa tradisional pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai media ekspresi estetika, tetapi juga menjadi ruang produksi wacana sosial-politik yang merepresentasikan relasi kuasa, kritik moral, dan resistensi budaya. Dalam konteks masyarakat Jawa feodal, teks sastra sering kali digunakan sebagai medium simbolik untuk menyampaikan kritik terhadap penguasa tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sastra Jawa memiliki dimensi ideologis yang kuat karena beroperasi di tengah struktur sosial yang hierarkis dan paternalistik. Salah satu karya yang memperlihatkan karakter demikian ialah *Serat Wicara Keras* karya R. Ng. Yasadipura II, sebuah teks yang secara eksplisit memuat sindiran keras terhadap elite kekuasaan, kemerosotan moral penguasa, serta penyimpangan etika kepemimpinan Jawa (Yasadipura II, 1926).

Kajian terhadap *Serat Wicara Keras* menjadi penting karena teks ini tidak sekadar memuat ajaran moral normatif sebagaimana sebagian besar serat piwulang Jawa, tetapi juga menghadirkan kritik sosial-politik yang tajam melalui satire, ironi, metafora, dan diksi konfrontatif. Ahmad Wahyu Sudrajad menjelaskan bahwa *Serat Wicara Keras* merepresentasikan kegelisahan sosial pengarang terhadap situasi politik Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwana IV yang ditandai oleh krisis legitimasi kekuasaan dan konflik elite keraton (Sudrajad, 2014). Dalam konteks tersebut, teks ini dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi intelektual yang berupaya melakukan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari nilai etika Jawa. Kritik tersebut disampaikan melalui bahasa simbolik dan satire agar tetap dapat beroperasi dalam ruang budaya feodal yang membatasi kritik langsung terhadap raja atau elite penguasa.

Dalam perspektif budaya politik Jawa, kekuasaan ideal dipahami sebagai instrumen harmoni sosial yang menuntut pemimpin memiliki laku utama seperti adil, bijaksana, welas asih, serta mampu menjaga keseimbangan kosmos sosial. Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa etika kekuasaan Jawa menempatkan pemimpin sebagai pusat moral masyarakat sehingga legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik, tetapi juga kualitas etis penguasa (Franz Magnis-Suseno, 1984). Oleh sebab itu, ketika kekuasaan dijalankan secara represif, manipulatif, dan eksploitatif, maka sastra hadir sebagai medium kritik moral terhadap krisis kepemimpinan tersebut. Dalam hal ini, *Serat Wicara Keras* menunjukkan bagaimana pengarang menggunakan bahasa sastra sebagai instrumen delegitimasi terhadap elite yang dianggap telah kehilangan orientasi etika kekuasaan Jawa.

Fenomena tersebut relevan dibaca melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) karena pendekatan ini menempatkan bahasa sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan ideologi, dominasi, dan relasi kuasa. Norman Fairclough menjelaskan bahwa wacana tidak pernah

netral sebab bahasa selalu terhubung dengan kepentingan sosial dan produksi kekuasaan (Fairclough, 1995). Dengan demikian, Serat Wicara Keras tidak hanya dapat dipahami sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai arena diskursif tempat berlangsungnya pertarungan ideologi antara otoritas kekuasaan dan suara kritis masyarakat. Perspektif tersebut diperkuat oleh Teun A. van Dijk yang menyatakan bahwa wacana merupakan instrumen produksi dominasi sosial melalui kontrol terhadap pengetahuan, kesadaran, dan struktur makna masyarakat (Dijk, 2008). Oleh karena itu, pembacaan terhadap Serat Wicara Keras melalui AWK memungkinkan peneliti mengungkap bagaimana satire bekerja sebagai strategi simbolik untuk membongkar hegemoni politik Jawa tradisional.

Selain itu, satire dalam Serat Wicara Keras dapat dipahami sebagai bentuk hidden transcript atau perlawanan terselubung sebagaimana dikemukakan James C. Scott. Menurut Scott, kelompok subordinat sering kali menyampaikan kritik terhadap kekuasaan melalui simbol, humor, sindiran, dan narasi tersembunyi guna menghindari represi langsung dari penguasa (James C. Scott, 1990). Dalam konteks ini, satire yang digunakan Yasadipura II bukan sekadar bentuk ekspresi emosional, tetapi strategi subversif untuk mendeligitimasi praktik kekuasaan yang korup dan tidak etis. Aloysius Indratmo dkk. menegaskan bahwa Serat Wicara Keras memuat kritik terhadap hegemoni priyayi Jawa dan menunjukkan adanya resistensi simbolik terhadap dominasi elite keraton (Aloysius Indratmo, Waki Abdullah Rais, Susanto, 2022). Hal tersebut memperlihatkan bahwa teks sastra Jawa tradisional memiliki kapasitas sebagai ruang counter-hegemony yang mampu menggugat struktur kekuasaan dominan melalui produksi wacana alternatif.

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa satire politik memiliki fungsi penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik kekuasaan. Syamsul Bahri dkk. menjelaskan bahwa satire dalam wacana politik bekerja sebagai strategi linguistik untuk mengkritik dominasi elite dan membangun resistensi sosial terhadap hegemoni politik (Syamsul Bahri, Nora Ronita Dewi, 2026.). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa satire tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau ekspresi humor, melainkan instrumen ideologis untuk membongkar ketimpangan relasi kuasa. Dengan demikian, pembacaan terhadap Serat Wicara Keras menjadi semakin relevan karena teks ini memperlihatkan bahwa tradisi sastra Jawa telah lama menghadirkan kritik politik melalui mekanisme simbolik yang kompleks jauh sebelum berkembangnya media kritik modern.

Urgensi penelitian ini juga semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi sosial-politik kontemporer yang masih memperlihatkan problem etika kekuasaan seperti korupsi, oligarki politik, penyalahgunaan wewenang, dan krisis moral kepemimpinan publik. John Abraham Ziswan Suryosumunar dkk. menunjukkan bahwa nilai kritik dalam Serat Wicara Keras masih memiliki relevansi terhadap fenomena politik dinasti dan krisis etika kepemimpinan Indonesia masa kini

(Suryosumunar, T., Rahmawati, L., & Purnomo, 2026). Dengan demikian, teks ini tidak hanya memiliki nilai historis dan filologis, tetapi juga relevansi kontekstual dalam membaca problem kekuasaan modern. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Satir dan Subversi Politik: Analisis Wacana Kritis Etika Kekuasaan Jawa dalam Serat Wicara Keras penting dilakukan untuk mengungkap bagaimana teks sastra Jawa digunakan sebagai medium kritik terhadap kekuasaan melalui strategi satire dan praktik subversi diskursif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian sastra Jawa, Analisis Wacana Kritis, dan studi budaya politik Nusantara, sekaligus memperlihatkan bahwa sastra tradisional Jawa memiliki kapasitas intelektual sebagai medium refleksi etis dan resistensi politik lintas zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada pembacaan kritis terhadap teks Serat Wicara Keras karya R. Ng. Yasadipura II sebagai objek material penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara statistik, melainkan memahami konstruksi makna, relasi kuasa, ideologi, serta praktik kritik politik yang direpresentasikan melalui bahasa sastra Jawa. Dalam konteks penelitian sastra dan budaya, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap struktur teks, konteks historis, dan praktik diskursif yang melatarbelakangi lahirnya karya sastra tersebut (Creswell, 2018). Secara metodologis, penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model Norman Fairclough yang dipadukan dengan konsep hidden transcript James C. Scott serta teori hegemoni Antonio Gramsci. Penggunaan model Fairclough dipilih karena mampu membaca teks tidak hanya sebagai struktur linguistik, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan ideologi dan relasi kekuasaan (Fairclough, 1995). Dalam perspektif ini, Serat Wicara Keras dipahami bukan sekadar karya sastra moralistik, melainkan arena diskursif yang memproduksi kritik terhadap kekuasaan Jawa melalui strategi satire dan simbolisme budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Satire sebagai Strategi Kritik terhadap Etika Kekuasaan Jawa

Serat Wicara Keras karya R. Ng. Yasadipura II memperlihatkan bahwa sastra Jawa tradisional tidak hanya berfungsi sebagai media estetika, melainkan juga sebagai ruang kritik sosial-politik terhadap praktik kekuasaan. Dalam teks tersebut, satire digunakan sebagai instrumen diskursif untuk menyampaikan kegelisahan pengarang terhadap kemerosotan moral elite keraton Surakarta. Kritik tersebut muncul melalui penggunaan diksi keras, metafora peyoratif, ironi, dan

simbolisasi kerusakan sosial yang merepresentasikan krisis etika kepemimpinan Jawa. Sebagaimana dijelaskan Sudrajad (2014), Serat Wicara Keras lahir dalam konteks ketegangan politik internal Kasunanan Surakarta pada masa Pakubuwana IV sehingga teks ini tidak dapat dipisahkan dari situasi sosial-politik yang melatarbelakanginya. Kondisi sosial-politik Jawa pada masa Pakubuwana IV memang ditandai oleh konflik internal keraton, perebutan pengaruh elite priyayi, serta melemahnya legitimasi moral penguasa. Dalam situasi tersebut, sastra menjadi salah satu medium aman bagi pujangga untuk menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Berbeda dengan kritik politik modern yang cenderung terbuka, kritik dalam sastra Jawa tradisional disampaikan melalui simbol, metafora, dan satire agar tidak secara langsung menantang otoritas raja. Oleh sebab itu, Serat Wicara Keras dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi intelektual yang lahir dari kegelisahan sosial pengarang terhadap kerusakan moral elite penguasa (Sudrajad, 2014).

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, bahasa tidak pernah bersifat netral karena selalu berkaitan dengan produksi ideologi dan relasi kekuasaan (Fairclough, 1995) (Fairclough, 1995). Bahasa dalam teks sastra bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen ideologis yang mampu membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial. Oleh sebab itu, penggunaan satire dalam Serat Wicara Keras dapat dipahami sebagai praktik diskursif yang berupaya membongkar legitimasi moral elite penguasa. Kritik tersebut tidak disampaikan secara eksplisit melalui perlawanan terbuka, tetapi melalui simbolisme bahasa yang memungkinkan pengarang tetap berada dalam koridor budaya feodal Jawa.

Salah satu bentuk satire dalam teks tampak pada bait Pupuh Sinom yang menyatakan: *“Sadaya samya amukti, tan milu mati ragi, mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk.”* (Sekarang semua sama-sama berkecukupan, tak ikut mati raga, duduk-duduk santai mendapat kenyamanan). Ungkapan “mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk” merupakan bentuk satire sosial yang menyindir elite penguasa yang menikmati kenyamanan kekuasaan tanpa menjalankan laku prihatin dan pengendalian diri sebagaimana tradisi kepemimpinan Jawa sebelumnya. Pada bagian penjelasan teks dijelaskan bahwa para elite “bersikap santai mentang-mentang sudah berkuasa” dan merasa cukup hanya dengan menikmati fasilitas sosial tanpa melakukan usaha moral maupun spiritual. Dalam konteks ini, satire digunakan untuk memperlihatkan kemerosotan moral elite yang dianggap telah kehilangan kesadaran etik sebagai pemimpin masyarakat (Yasadipura II, 1926).

Bahasa keras yang digunakan Yasadipura II menunjukkan adanya kemarahan intelektual terhadap elite yang dianggap telah menyimpang dari prinsip kepemimpinan Jawa. Dalam etika Jawa, pemimpin ideal harus memiliki sikap ngayomi, adil, bijaksana, serta mampu menjaga harmoni sosial (Franz Magnis-Suseno, 1984). Kepemimpinan Jawa tidak hanya menuntut kekuasaan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual terhadap rakyat. Namun,

dalam Serat Wicara Keras, penguasa justru direpresentasikan sebagai sumber kerusakan moral masyarakat karena lebih mengutamakan kepentingan duniawi dibanding kesejahteraan sosial.

Kritik terhadap kerusakan moral elite juga tampak pada bait berikut: “*Yèn wong tuwane tan lumrah, turune yêkti nêmahî.*” (*Kalau orang tuanya berbuat tidak lumrah, keturunannya benar-benar akan menuai akibat*). Bait tersebut menunjukkan bahwa perilaku buruk elite tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga melahirkan kerusakan sosial yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Penjelasan teks menegaskan bahwa apabila seorang pemimpin meninggalkan laku prihatin dan moralitas, maka anak cucunya akan menerima akibat dari penyimpangan tersebut. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, ungkapan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk delegitimasi terhadap elite yang gagal menjalankan fungsi moral sebagai panutan masyarakat (Yasadipura II, 1926).

Selain menggunakan satire moral, Yasadipura II juga menghadirkan konstruksi ideal mengenai pemimpin Jawa sebagai bentuk kritik implisit terhadap realitas politik saat itu. Hal tersebut tampak pada bait: “*Asih ing para ngulama, wêlas marang pêkir miskin, awêtà dèn aubi.*” (*Penuh kasih pada para ulama, belas kasih kepada fakir miskin, lestari dalam mengayomi*). Bait tersebut memperlihatkan bahwa pemimpin ideal dalam tradisi Jawa harus: dekat dengan ulama, melindungi rakyat kecil, dan mengedepankan welas asih sosial. Namun, idealisasi tersebut secara tidak langsung menjadi kritik terhadap elite keraton yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengayoman sosial. Dengan kata lain, Yasadipura II menggunakan konstruksi pemimpin ideal untuk memperlihatkan kontras antara etika kekuasaan Jawa dengan praktik politik elite yang mengalami dekadensi moral (Yasadipura II, 1926).

Dalam perspektif James C. Scott (1990), strategi kritik seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk hidden transcript atau perlawanan tersembunyi. Kritik terhadap penguasa tidak disampaikan secara frontal karena struktur sosial feodal Jawa sangat membatasi oposisi terbuka terhadap raja. Oleh sebab itu, satire dan simbolisme menjadi mekanisme aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Dalam konteks ini, Serat Wicara Keras berfungsi sebagai ruang resistensi simbolik terhadap dominasi elite keraton. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa satire dalam teks tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi emosional pengarang, tetapi juga sebagai mekanisme delegitimasi terhadap kekuasaan yang dianggap kehilangan otoritas etikanya. Satire bekerja sebagai strategi diskursif untuk membangun kesadaran moral masyarakat bahwa kekuasaan yang kehilangan etika pada akhirnya akan melahirkan krisis sosial. Dengan demikian, bahasa satire dalam Serat Wicara Keras memiliki dimensi ideologis yang kuat karena berupaya menggugat legitimasi moral penguasa melalui simbolisme budaya Jawa (James C. Scott, 1990).

Lebih jauh lagi, kritik dalam Serat Wicara Keras menunjukkan bahwa sastra Jawa tradisional memiliki kapasitas sebagai medium counter-hegemony terhadap dominasi politik feodal. Sebagaimana dijelaskan Indratmo dkk. (2022), teks ini memuat resistensi simbolik terhadap hegemoni priyayi dan struktur kekuasaan keraton yang eksploitatif. Oleh sebab itu, satire dalam teks tidak dapat dipahami semata sebagai gaya bahasa sastra, melainkan sebagai praktik diskursif yang berupaya membongkar relasi kuasa dan krisis legitimasi politik Jawa. Dengan demikian, Serat Wicara Keras memperlihatkan bahwa sastra Jawa tradisional bukan hanya ruang produksi nilai moral, tetapi juga arena kritik politik terhadap penyimpangan etika kekuasaan. Melalui satire, metafora, dan simbolisme bahasa, Yasadipura II menghadirkan bentuk resistensi intelektual terhadap elite penguasa yang dianggap telah kehilangan tanggung jawab moralnya. Dalam konteks tersebut, satire berfungsi sebagai instrumen kritik sosial yang membangun kesadaran etis masyarakat sekaligus menggugat dominasi kekuasaan feodal Jawa (Aloysius Indratmo, Wakti Abdullah Rais, Susanto, 2022).

B. Subversi Politik dan Hidden Transcript dalam Serat Wicara Keras

Sebagai teks yang lahir dalam lingkungan keraton, Serat Wicara Keras memperlihatkan strategi kritik yang cenderung terselubung. Hal tersebut berkaitan dengan kultur politik Jawa yang menempatkan raja sebagai pusat kekuasaan sakral sehingga kritik langsung terhadap penguasa berpotensi dianggap sebagai bentuk pembangkangan politik. Oleh sebab itu, Yasadipura II menggunakan satire dan simbolisme sebagai bentuk hidden transcript atau perlawanan tersembunyi sebagaimana dikemukakan James C. Scott (1990). Dalam konteks budaya feodal Jawa, strategi simbolik seperti ini menjadi cara aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan otoritas politik keraton (James C. Scott, 1990).

Scott menjelaskan bahwa kelompok subordinat umumnya membangun ruang kritik terselubung melalui humor, sindiran, simbol, dan narasi alternatif guna menghindari represi kekuasaan. Dalam konteks Serat Wicara Keras, strategi tersebut tampak melalui penggunaan metafora sosial yang menggambarkan kerusakan moral elite tanpa menyebutkan secara langsung figur politik tertentu. Dengan demikian, teks berfungsi sebagai medium resistensi simbolik terhadap dominasi kekuasaan keraton. Kritik yang dibangun Yasadipura II tidak bersifat frontal, tetapi bekerja melalui mekanisme bahasa yang menyimpan lapisan makna politis di balik struktur sastra Jawa.

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, praktik bahasa selalu berkaitan dengan produksi kekuasaan dan ideologi (Fairclough, 1995). Oleh sebab itu, penggunaan simbol dan satire dalam Serat Wicara Keras bukan sekadar pilihan estetis, melainkan strategi diskursif untuk mendeligitimasi moral elite penguasa. Bahasa dalam teks bekerja sebagai

instrumen ideologis yang membentuk kesadaran sosial pembaca mengenai krisis kepemimpinan Jawa pada masa itu.

Bentuk kritik tersebut tampak dalam bait ke-10 Pupuh Sinom yang menyatakan: “*Sadaya samya amukti, tan milu mati ragi, mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk.*” (*Sekarang semua sama-sama berkecukupan, tak ikut mati raga, duduk-duduk santai mendapat kenyamanan*). Kutipan tersebut menunjukkan adanya kritik tajam terhadap elite penguasa yang menikmati kenyamanan kekuasaan tanpa menjalankan laku prihatin dan pengendalian diri sebagaimana tradisi kepemimpinan Jawa sebelumnya. Pada bagian penjelasan teks disebutkan bahwa para keturunan elite “bersikap santai mentang-mentang sudah berkuasa” dan “seolah-olah mereka duduk saja mendapatkan kenyamanan”. Ungkapan “*mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk*” menjadi simbol elite yang pasif, hedonistik, dan kehilangan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. (Yasadipura II, 1926).

Secara diskursif, bait tersebut memperlihatkan bagaimana Yasadipura II membangun kritik terhadap budaya kekuasaan yang hanya berorientasi pada privilese politik. Dalam etika kepemimpinan Jawa, seorang pemimpin ideal seharusnya menjalankan laku tirakat, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat. Namun, elite dalam teks justru direpresentasikan sebagai kelompok yang menikmati kekuasaan tanpa usaha etik maupun spiritual. Oleh sebab itu, satire dalam bait tersebut bekerja sebagai mekanisme delegitimasi terhadap otoritas moral penguasa.

Selain itu, kritik terhadap krisis moral elite juga tampak dalam bait ke-8 Pupuh Sinom: “*Yèn wong tuwane tan lumrah, turune yêkti nêmah.*” (*Kalau orang tuanya berbuat tidak lumrah, keturunannya benar-benar akan menuai akibat*). Bait tersebut bukan sekadar nasihat moral keluarga, tetapi juga dapat dibaca sebagai kritik terhadap elite kekuasaan yang gagal memberikan teladan etis kepada generasi penerusnya. Penjelasan teks menegaskan bahwa perilaku buruk penguasa akan melahirkan kerusakan sosial yang diwariskan kepada anak-cucu dan masyarakat luas. Dalam perspektif budaya Jawa, pemimpin memiliki posisi sentral sebagai sumber keteladanan moral masyarakat. Oleh sebab itu, ketika elite mengalami dekadensi etik, kerusakan sosial akan meluas ke seluruh struktur masyarakat (Yasadipura II, 1926).

Kritik terhadap keteladanan elite tersebut menunjukkan bahwa Yasadipura II tidak hanya mempersoalkan perilaku individu penguasa, tetapi juga struktur moral kekuasaan Jawa secara keseluruhan. Bahasa dalam bait tersebut bekerja sebagai instrumen ideologis untuk memperlihatkan bahwa penyimpangan elite akan menghasilkan krisis sosial yang diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, teks tidak hanya memproduksi kritik moral, tetapi juga membangun kesadaran sosial mengenai bahaya kekuasaan yang kehilangan etika.

Kritik terhadap elite penguasa semakin eksplisit dalam bait ke-11 Pupuh Sinom: “*Asih ing para ngulama, wêlas marang pêkir miskin, awèta dèn aubi.*” (*Penuh kasih pada para ulama, belas kasih kepada fakir miskin, lestari dalam mengayomi*). Melalui bait tersebut, Yasadipura II menghadirkan konstruksi ideal mengenai pemimpin Jawa yang seharusnya: mengayomi rakyat, dekat dengan ulama, serta memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat miskin. Namun, idealisasi tersebut secara implisit justru menjadi kritik terhadap realitas kekuasaan pada masa itu yang dianggap gagal menjalankan fungsi moralnya. Dengan kata lain, representasi pemimpin ideal digunakan sebagai strategi diskursif untuk memperlihatkan kontras antara etika kepemimpinan Jawa dengan praktik politik elite keraton yang mengalami dekadensi moral (Yasadipura II, 1926).

Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni bekerja melalui legitimasi budaya dan moral yang dibangun oleh kelompok dominan. Ketika elite kehilangan legitimasi etikanya, maka akan muncul krisis hegemoni yang membuka ruang bagi lahirnya wacana tandingan. Temuan ini memperkuat argumentasi Indratmo dkk. (2022) bahwa Serat Wicara Keras memuat kritik terhadap hegemoni priyayi Jawa dan dominasi elite sosial-politik keraton. Oleh sebab itu, ketika Yasadipura II membongkar kerusakan moral elite, sesungguhnya ia sedang menggugat legitimasi ideologis kekuasaan Jawa (Aloysius Indratmo, Wakti Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Selain melalui satire moral, bentuk hidden transcript dalam Serat Wicara Keras juga tampak melalui penggunaan simbol-simbol sosial yang menggambarkan keterbalikan nilai dalam masyarakat. Elite yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru direpresentasikan sebagai sumber kerusakan sosial. Sebaliknya, masyarakat kecil menjadi korban dari praktik kekuasaan yang eksploitatif dan kehilangan orientasi etik. Dalam konteks ini, teks bekerja sebagai ruang resistensi simbolik yang menghadirkan kritik terhadap relasi dominasi dalam struktur politik Jawa. Secara operasional, bentuk subversi politik dalam Serat Wicara Keras dapat dipetakan sebagaimana dalam

Tabel 1.

Bentuk Subversi	Bukti Teks	Fungsi Kritik
Satire moral	“mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk”	Kritik terhadap elite yang menikmati kekuasaan tanpa laku prihatin
Kritik keteladanan elite	“Yèn wong tuwane tan lumrah, turune yêkti nêmah”	Delegitimasi moral penguasa
Idealisasi pemimpin	“Asih ing para ngulama, wêlas marang pêkir miskin”	Kritik implisit terhadap krisis etika kepemimpinan

Sumber: Analisis Peneliti berdasarkan Serat Wicara Keras karya R. Ng. Yasadipura II (1926)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa subversi politik dalam Serat Wicara Keras tidak dilakukan melalui pemberontakan terbuka, melainkan melalui mekanisme simbolik dan diskursif. Satire, metafora, dan konstruksi moral ideal digunakan sebagai instrumen untuk membongkar legitimasi elite keraton secara perlahan namun sistematis. Dengan demikian, Serat Wicara Keras menunjukkan bahwa sastra Jawa tradisional memiliki kapasitas sebagai medium counter-hegemony yang mampu menghadirkan resistensi intelektual terhadap dominasi kekuasaan feodal Jawa.

C. Hegemoni Priyayi dan Krisis Legitimasi Kekuasaan

Pembacaan terhadap Serat Wicara Keras memperlihatkan adanya kritik yang kuat terhadap hegemoni priyayi sebagai kelompok elite yang mengontrol struktur sosial-politik Jawa. Priyayi dalam tradisi Jawa bukan hanya kelas birokratik, tetapi juga representasi otoritas budaya, moral, dan simbol kekuasaan masyarakat. Dalam struktur feodal Jawa, priyayi diposisikan sebagai perantara antara raja dan rakyat sehingga memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat. Akan tetapi, dalam Serat Wicara Keras, priyayi justru direpresentasikan mengalami dekadensi moral sehingga kehilangan legitimasi etik di hadapan masyarakat (Aloysius Indratmo, Wakti Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni merupakan bentuk dominasi yang bekerja melalui persetujuan sosial dan legitimasi budaya, bukan semata-mata melalui kekuatan koersif (Antonio Gramsci, 1971). Kelompok dominan mempertahankan kekuasaan dengan membangun citra moral dan ideologi yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Oleh sebab itu, ketika elite gagal mempertahankan legitimasi moralnya, maka akan muncul krisis hegemoni yang memicu lahirnya wacana tandingan. Kondisi tersebut tampak jelas dalam Serat Wicara Keras melalui representasi elite sebagai kelompok yang haus kekuasaan, manipulatif, dan menjauh dari nilai keadilan sosial.

Kritik terhadap elite priyayi tampak dalam bait Pupuh Sinom berikut: “Sadaya samya amukti, tan milu mati ragi, mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk.” (Sekarang semua sama-sama berkecukupan, tak ikut mati raga, duduk-duduk santai mendapat kenyamanan). Ungkapan tersebut tidak hanya menyindir perilaku elite yang menikmati kemewahan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kelas priyayi telah kehilangan etos kepemimpinan Jawa yang menekankan laku prihatin, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Penjelasan teks menyebutkan bahwa elite “duduk saja mendapatkan kenyamanan” dan hidup santai karena privilese kekuasaan. Dalam konteks hegemoni Gramscian, kondisi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi moral karena elite tidak lagi menjalankan fungsi etikanya sebagai pengayom masyarakat (Antonio Gramsci, 1971).

Krisis legitimasi tersebut semakin terlihat ketika Yasadipura II menggambarkan bahwa perilaku buruk elite akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hal tersebut tampak pada bait: “Yèn wong tuwane tan lumrah, turune yêkti nêmahî.” (Kalau orang tuanya berbuat tidak lumrah, keturunannya benar-benar akan menuai akibat). Bait tersebut memperlihatkan bahwa dekadensi moral elite bukan hanya persoalan individual, tetapi telah menjadi krisis struktural dalam sistem kekuasaan Jawa. Penjelasan teks menegaskan bahwa perilaku buruk pemimpin akan berdampak pada anak-cucu dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, Yasadipura II menunjukkan bahwa hegemoni priyayi tidak lagi menghasilkan keteladanan moral, melainkan justru melahirkan kerusakan sosial yang diwariskan lintas generasi.

Dalam budaya politik Jawa, legitimasi seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan menjaga harmoni sosial dan keseimbangan moral masyarakat. Franz Magnis-Suseno (1984) menjelaskan bahwa kekuasaan Jawa idealnya dijalankan berdasarkan prinsip ngayomi, adil, wicaksana, dan memiliki orientasi spiritual terhadap kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dalam Serat Wicara Keras, elite priyayi justru direpresentasikan menjauh dari nilai-nilai tersebut. Kekuasaan tidak lagi dijalankan sebagai amanah moral, tetapi berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan privilese sosial dan dominasi politik (Franz Magnis-Suseno, 1984).

Kritik terhadap hegemoni priyayi juga tampak melalui konstruksi pemimpin ideal yang dihadirkan Yasadipura II. Dalam bait berikut dinyatakan: “Asih ing para ngulama, wêlas marang pêkir miskin, awêtâ dèn aubi.” (Penuh kasih pada para ulama, belas kasih kepada fakir miskin, lestari dalam mengayomi). Melalui bait tersebut, pengarang menghadirkan gambaran ideal pemimpin Jawa yang: dekat dengan rakyat, menghormati ulama, dan memiliki kepedulian sosial terhadap kelompok miskin. Namun, idealisasi tersebut sesungguhnya menjadi kritik implisit terhadap elite priyayi yang gagal menjalankan fungsi pengayoman sosial. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis, strategi seperti ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun oposisi simbolik antara idealitas kekuasaan dengan realitas politik yang korup dan eksploitatif (Fairclough, 1995).

Lebih jauh lagi, kritik Yasadipura II tidak hanya diarahkan kepada individu tertentu, melainkan kepada struktur kekuasaan Jawa secara keseluruhan. Priyayi dalam teks direpresentasikan sebagai kelompok yang telah terjebak dalam budaya feodalistik dan orientasi materialistik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keterputusan antara elite dan rakyat sehingga kekuasaan kehilangan basis legitimasi sosialnya. Dengan demikian, Serat Wicara Keras dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap krisis hegemoni dalam masyarakat Jawa akhir abad XVIII hingga awal abad XIX (Aloysius Indratmo, Wakit Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Dalam perspektif James C. Scott (1990), kritik seperti ini dapat dikategorikan sebagai hidden transcript atau bentuk resistensi simbolik terhadap dominasi elite. Karena struktur sosial feodal tidak memungkinkan kritik terbuka terhadap penguasa, maka Yasadipura II menggunakan satire, metafora, dan simbol moral sebagai medium perlawanan diskursif. Strategi tersebut memungkinkan kritik tetap tersampaikan tanpa harus secara langsung menantang otoritas politik keraton (James C. Scott, 1990).

Temuan ini memperkuat argumentasi Indratmo dkk. (2022) bahwa Serat Wicara Keras memuat resistensi terhadap hegemoni priyayi Jawa dan dominasi elite keraton. Sastra dalam konteks ini tidak lagi sekadar menjadi media hiburan atau moralitas pasif, melainkan arena produksi wacana tandingan terhadap struktur kekuasaan yang menindas masyarakat. Oleh sebab itu, satire dalam teks memiliki fungsi ideologis sebagai instrumen delegitimasi terhadap elite yang kehilangan otoritas moralnya (Aloysius Indratmo, Wakit Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Penelitian Suryosumunar dkk. (2026) menunjukkan bahwa nilai kritik dalam Serat Wicara Keras masih relevan dengan kondisi politik Indonesia kontemporer, terutama terkait praktik politik dinasti, oligarki, dan krisis moral elite. Fenomena elite yang mempertahankan kekuasaan melalui jaringan keluarga, privilese politik, dan dominasi ekonomi memperlihatkan adanya kesinambungan problem kekuasaan antara masa Jawa tradisional dengan situasi modern saat ini. Dengan demikian, teks ini memiliki dimensi transhistoris karena mampu merefleksikan problem kekuasaan lintas zaman (Suryosumunar, T., Rahmawati, L., & Purnomo, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Serat Wicara Keras tidak hanya memuat kritik moral individual, tetapi juga membongkar krisis legitimasi dalam struktur hegemoni priyayi Jawa. Melalui satire, simbolisme, dan konstruksi etika kepemimpinan, Yasadipura II menghadirkan bentuk resistensi intelektual terhadap dominasi elite yang kehilangan tanggung jawab sosial dan moralnya. Dalam konteks ini, sastra Jawa tradisional tampil sebagai medium counter-hegemony yang berupaya membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap penyimpangan etika kekuasaan.

D. Relevansi Serat Wicara Keras terhadap Kritik Politik Kontemporer

Meskipun lahir dalam konteks Jawa tradisional, Serat Wicara Keras memiliki relevansi yang kuat terhadap dinamika politik modern. Kritik terhadap penguasa yang korup, manipulatif, dan kehilangan etika kepemimpinan masih menjadi persoalan utama dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, teks ini dapat dipahami sebagai refleksi kultural mengenai pentingnya moralitas dalam praktik kekuasaan. Nilai-nilai kritik yang dibangun Yasadipura II memperlihatkan bahwa problem penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya fenomena historis masa lampau, tetapi persoalan yang terus berulang dalam berbagai rezim politik (Aloysius Indratmo, Wakit Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Dalam konteks Indonesia kontemporer, praktik politik oligarkis, korupsi struktural, dan politik dinasti menunjukkan adanya kemiripan dengan kritik yang disampaikan dalam Serat Wicara Keras. Elite politik modern sering kali mempertahankan kekuasaan melalui jaringan keluarga, kedekatan ekonomi, dan manipulasi simbolik terhadap masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa yang dikritik Yasadipura II masih terus berlangsung dalam sistem politik modern, meskipun dalam bentuk dan medium yang berbeda (Prasetyo & Ramadhan, 2025).

Kritik terhadap elite yang menikmati privilese kekuasaan tampak dalam bait Pupuh Sinom berikut: *“Sadaya samya amukti, tan milu mati ragi, mangkruk-mangkruk nêmu gêthuk.”* (Sekarang semua sama-sama berkecukupan, tak ikut mati raga, duduk-duduk santai mendapat kenyamanan). Ungkapan tersebut dapat dibaca secara kontekstual sebagai kritik terhadap elite yang memperoleh kenyamanan politik tanpa tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam realitas politik kontemporer, kondisi serupa tampak melalui perilaku elite yang lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dibanding kesejahteraan publik. Penjelasan teks yang menyebutkan bahwa elite “duduk saja mendapatkan kenyamanan” menunjukkan adanya kritik terhadap budaya privilese politik yang masih relevan hingga saat ini (Suryosumunar, T., Rahmawati, L., & Purnomo, 2026).

Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, bahasa bekerja sebagai instrumen ideologis yang membentuk cara masyarakat memahami relasi kekuasaan (Fairclough, 1995). Oleh sebab itu, satire dalam Serat Wicara Keras dapat dipahami sebagai bentuk produksi wacana tandingan terhadap dominasi elite. Bahasa satire tidak hanya menghadirkan kritik moral, tetapi juga membangun kesadaran sosial mengenai ketimpangan kekuasaan dan penyimpangan etika politik (Wahyudi & Setiawan, 2025).

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa satire politik masih menjadi medium efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap dominasi elite. Bahri dkk. (2026) menjelaskan bahwa satire berfungsi sebagai strategi linguistik untuk membongkar hegemoni politik dan membangun resistensi sosial melalui bahasa simbolik. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesinambungan historis antara tradisi satire Jawa klasik dengan praktik kritik politik modern di media sosial dan ruang publik digital (Syamsul Bahri, Nora Ronita Dewi, 2026.).

Dalam era digital, satire politik berkembang melalui meme, karikatur, video parodi, dan komentar satiris di media sosial. Meskipun medium yang digunakan berbeda, mekanisme kritiknya memiliki pola yang serupa dengan Serat Wicara Keras, yaitu menggunakan simbol, ironi, dan humor untuk menyampaikan kritik terhadap elite penguasa. Dalam konteks ini, satire menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap praktik kekuasaan tanpa harus melakukan konfrontasi politik secara langsung (Putri & Wibowo, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tradisi kritik simbolik sebenarnya telah lama hidup dalam budaya Nusantara. Serat Wicara Keras menunjukkan bahwa sastra Jawa klasik bukan sekadar teks moral yang pasif, melainkan arena produksi wacana kritis terhadap struktur kekuasaan. Hal tersebut sekaligus membantah pandangan orientalis yang menganggap sastra Jawa hanya berfungsi sebagai legitimasi budaya feodal dan alat penguatan otoritas keraton (Sudrajat, 2014).

Kritik terhadap krisis moral elite juga tampak dalam bait berikut: *“Yèn wong tuwane tan lumrah, turune yêkti nêmahî.”* (Kalau orang tuanya berbuat tidak lumrah, keturunannya benar-benar akan menuai akibat). Bait tersebut memperlihatkan bahwa penyimpangan moral elite akan menghasilkan kerusakan sosial yang diwariskan lintas generasi. Dalam konteks politik modern, kritik ini relevan terhadap praktik politik dinasti dan oligarki yang menyebabkan kekuasaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Penjelasan teks menegaskan bahwa perilaku buruk elite akan melahirkan dampak sosial yang luas. Dengan demikian, Yasadipura II sesungguhnya telah menghadirkan kritik mengenai bahaya kekuasaan yang kehilangan tanggung jawab etiknya (Aloysius Indratmo, Wakit Abdullah Rais, Susanto, 2022).

Dalam perspektif Antonio Gramsci, dominasi elite akan bertahan selama masyarakat masih menerima legitimasi moral penguasa (Antonio Gramsci, 1971). Akan tetapi, ketika elite mengalami dekadensi moral, maka akan muncul krisis hegemoni yang membuka ruang resistensi sosial. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam masyarakat modern ketika kritik terhadap korupsi, nepotisme, dan oligarki semakin berkembang melalui media digital, gerakan sosial, maupun produksi budaya populer (Prasetyo & Ramadhan, 2025).

Selain itu, konsep hidden transcript James C. Scott (1990) juga relevan dalam membaca praktik kritik politik kontemporer. Scott menjelaskan bahwa kelompok subordinat cenderung membangun ruang kritik terselubung melalui humor, simbol, dan satire untuk menghindari represi kekuasaan (James C. Scott, 1990). Fenomena tersebut tampak jelas dalam budaya digital saat ini ketika masyarakat menggunakan meme politik, satire internet, dan humor sosial sebagai bentuk resistensi terhadap elite kekuasaan. Dengan demikian, mekanisme kritik dalam Serat Wicara Keras memiliki kesinambungan historis dengan praktik resistensi simbolik modern (Putri & Wibowo, 2024).

Lebih jauh lagi, relevansi Serat Wicara Keras menunjukkan bahwa sastra tradisional Nusantara memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Teks ini memperlihatkan bahwa kritik terhadap kekuasaan telah lama menjadi bagian dari tradisi intelektual Jawa. Oleh sebab itu, kajian terhadap Serat Wicara Keras tidak hanya penting dalam konteks sastra

dan sejarah, tetapi juga dalam memahami relasi antara budaya, ideologi, dan politik di Indonesia kontemporer (Suryosumunar, T., Rahmawati, L., & Purnomo, 2026).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *Serat Wicara Keras* merupakan praktik diskursif subversif yang menggunakan satire sebagai instrumen kritik terhadap krisis etika kekuasaan Jawa. Teks ini tidak hanya memiliki nilai sastra dan historis, tetapi juga kontribusi intelektual dalam memahami relasi antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam tradisi budaya Nusantara. Melalui satire dan simbolisme bahasa, Yasadipura II menghadirkan bentuk resistensi intelektual terhadap dominasi elite sekaligus membangun kesadaran moral masyarakat mengenai pentingnya etika dalam praktik kekuasaan (Syamsul Bahri, Nora Ronita Dewi, 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Serat Wicara Keras* karya R. Ng. Yasadipura II bukan sekadar karya sastra moral tradisional, melainkan teks kritik sosial-politik yang memuat satire dan subversi terhadap etika kekuasaan Jawa. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan satire, metafora, simbolisme, dan bahasa peyoratif dalam teks berfungsi sebagai instrumen delegitimasi terhadap elite keraton yang mengalami krisis moral dan kehilangan otoritas etikanya. Kritik tersebut diarahkan pada perilaku elite priyayi yang feodal, manipulatif, serta menjauh dari prinsip kepemimpinan Jawa yang ideal, seperti keadilan, pengayoman, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa strategi kritik dalam *Serat Wicara Keras* dilakukan melalui mekanisme *hidden transcript* atau perlawanan simbolik yang terselubung. Dalam konteks budaya politik Jawa yang menempatkan raja sebagai figur sakral, Yasadipura II menggunakan satire sebagai medium aman untuk menyampaikan kritik tanpa harus melakukan konfrontasi langsung terhadap kekuasaan. Dengan demikian, sastra berfungsi sebagai arena produksi wacana tandingan yang membongkar hegemoni priyayi dan krisis legitimasi moral elite keraton.

Selain memiliki dimensi historis, *Serat Wicara Keras* juga menunjukkan relevansi yang kuat terhadap kondisi politik Indonesia kontemporer. Kritik terhadap oligarki, politik dinasti, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan memperlihatkan adanya kesinambungan problem etika politik antara masa Jawa tradisional dengan realitas modern. Dalam konteks ini, satire dalam teks memiliki nilai transhistoris karena mampu merefleksikan persoalan kekuasaan lintas zaman.

Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa sastra Jawa tradisional tidak dapat dipahami hanya sebagai media estetika dan legitimasi budaya feodal, tetapi juga sebagai ruang resistensi intelektual terhadap dominasi kekuasaan. *Serat Wicara Keras* memperlihatkan bahwa

tradisi intelektual Jawa telah lama membangun budaya kritik politik melalui simbolisme bahasa dan strategi diskursif yang subtil. Dengan demikian, teks ini memiliki kontribusi penting dalam memperkaya kajian sastra, sejarah, budaya politik, dan relasi antara bahasa, ideologi, serta kekuasaan dalam tradisi Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Indratmo, Wakit Abdullah Rais, Susanto, D. S. (2022). Serat Wicara Keras and The Hegemony of Javanese Priyayi. *Proceedings of the 4th International Conference of Local Wisdom (Incolwis 2022)*.
- Antonio Gramsci. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publisher.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dijk, T. A. van. (2008). *Discourse and Power*. Palgrave Macmillan.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Franz Magnis-Suseno. (1984). *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Gramedia.
- James C. Scott. (1990). *Domination and the arts of resistance: Hidden transcripts*. Yale University Press. Yale University Press.
- Prasetyo, Y., & Ramadhan, F. (2025). Oligarki politik dan krisis legitimasi elite dalam demokrasi Indonesia kontemporer. *Jurnal Politik Indonesia*, 10(2).
- Putri, N. A., & Wibowo, A. (2024). Meme politik sebagai hidden transcript: Satire digital dan resistensi masyarakat Indonesia. *Jurnal Kajian Media*, 8(1).
- Sudrajad, A. W. (2014). Menelusuri Jejak Kehidupan Ulama dan Cendekiawan Pada Masa Dalam Teks Maulid Qashor H. Tabri di Surakarta. *Jumantara*, 5(1).
- Suryosumunar, T., Rahmawati, L., & Purnomo, H. (2026). Politik dinasti, oligarki, dan krisis moral elite: Relevansi nilai kritik Serat Wicara Keras dalam politik Indonesia kontemporer. *Jurnal Politik Dan Kebudayaan*, 9(1).
- Syamsul Bahri, Nora Ronita Dewi, M. E. I. (n.d.). Satire in Indonesian political discourse on social media: A critical discourse analysis of Eko Kuntadhi's Instagram posts. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, Vol.12(1).
- Wahyudi, R., & Setiawan, D. (2025). Satire politik dan budaya kritik digital generasi muda Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(3).
- Yasadipura II, R. N. (1926). *Serat Wicara Keras*. Tan Khoen Swie.